Peran Non-Governmental Organization dalam Lokalisasi Norma *Ending Gender-Based Violence* di Afrika Selatan

Hana Syakira[1], Anita Afriani Sinulingga[2], Putiviola Elian Nasir[3]

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: [1]hnsykr@gmail.com, [2]nanisinulingga@gmail.com, [3]putiviola@gmail.com

Abstract

This research aims to show how the interaction between the actors is in the process of ending gender-based violence norms brought in by international norms entrepreneurs such as UN Women, UNICEF, and UNFPA is then adapted to local practices by local actors in South Africa. South Africa is one of the highest gender-based violence in the world. The increasing number of cases have prompted local actors such as Sonke Gender Justice, the South African Youth Gender Action Plan and the Foundation for Human Rights who are engaged in the fulfilment of gender and human rights to contribute to the prevention of gender-based violence. This research used the concept of norms localization by Amitav Acharya. The method used in this study is a qualitative method with a type of descriptive analysis research from secondary data. This research has shown the interaction between international organizations, state, and local NGOs, particularly at the domestic level in the process of adjusting the norm of ending GBV. This research has also shown how interactions between these actors have successfully localized the norms characterized by institutional changes in the form of the issuance of the National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide by the South African government.

Keywords: *Gender-Based Violence, Non-Governmental Organization, Norms Entrepreneur, Norms Localization, South Africa.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Laporan United Nations (UN) Women's Gender Snapshot 2023 terdapat 245 juta perempuan dan anak perempuan terus menghadapi *Gender-Based Violence* (GBV) atau kekerasan berbasis gender berupa kekerasan fisik serta kekerasan seksual dari pasangan intim mereka setiap tahunnya (UN Women 2022). GBV merupakan salah satu permasalahan mengenai kesetaraan gender yang kemudian menjadi sebuah norma internasional. Hal ini ditandai dengan terciptanya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1979. Negara-negara di dunia kemudian

menunjukkan komitmen mereka untuk menangani penghapusan GBV ini secara bersama. Hal ini dapat dilihat dari dijadikannya GBV sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pada pilar kelima yang berbunyi "*Achieve gender equality and empower all women and girls*" (United Nations 2015).

Afrika Selatan merupakan negara dengan peringkat pertama sebagai negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Dilihat dari laporan Human Rights Watch pada tahun 2021, Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat GBV tertinggi di dunia, termasuk pemerkosaan, pembunuhan terhadap perempuan, serta kekerasan dalam rumah tangga (Human Right Watch 2021). Afrika Selatan merupakan negara yang telah mengadopsi norma anti kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sejak lama. Hal ini dapat terlihat dengan diratifikasinya CEDAW sebagai salah satu komitmen Afrika Selatan untuk memerangi kekerasan pada masa pemerintahan Presiden Nelson Mandela, tepatnya pada tahun 1995 (Commision for Gender Equality The Republic of South Africa 2020). Meskipun telah menunjukkan komitmennya, kasus GBV di Afrika Selatan tidak memperlihatkan penurunan yang drastis setiap tahunnya. Sebelumnya pada tahun 2019, Afrika Selatan menjadi negara dengan angka pemerkosaan tertinggi di dunia dengan sekitar 66.196 kasus per 100.000 orang (The Business Standart 2020).

Tingginya angka GBV di negara ini kemudian mendorong *international norms entrepreneur* untuk menindaklanjuti serta mencegah meningkatnya korban kekerasan berbasis gender dan *feminicide* di Afrika Selatan. Salah satu *international norms entrepreneur* tersebut yaitu UN Women. Dalam mengakhiri kekerasan berbasis gender, UN Women melakukan beberapa upaya advokasi dan komunikasi dalam menyebarkan nilai-nilai tersebut, seperti *raising awareness*, kampanye, serta *social mobilization* (UN Women 2023). Selain UN Women, *international norms entrepreneur* lainnya yang ikut andil dalam menyebarkan

norma mengakhiri GBV ini yaitu United Nations Children's Fund (UNICEF) dan United Nations Population Fund (UNFPA).

UN Women sebagai *norms entrepreneur* juga bekerja sama dengan aktor lokal seperti Sonke Gender Justice (SGJ) dalam mengatasi kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan (Sonke Gender Justice, n.d.). SGJ dalam praktiknya juga melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam menyebarkan norma-norma kesetaraan gender serta menghapuskan kekerasan berbasis gender di Afrika Selatan. SGJ bersama aktor lokal lain di Afrika Selatan seperti Foundation for Human Rights menjadi inisiator dalam gerakan *#TotalShutDown* movement di Afrika Selatan. Gerakan ini mendorong Presiden Ramaphosa untuk membentuk National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide (NSP-GBVF) (UN Women 2018). Hal ini terlihat jelas bahwa aktor lokal sangat berperan dalam penyebaran norma-norma gender di Afrika Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana interaksi aktor-aktor dalam proses penerimaan norma *ending gender-based violence* sebagai norma internasional untuk kemudian disesuaikan dengan praktik lokal di Afrika Selatan. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa referensi untuk mendapatkan data sekunder seperti artikel jurnal, buku, laporan tahunan dan juga situs resmi dari badan-badan terkait. Referensi tersebut telah membantu penulis untuk mendapatkan hasil penelitian tentang bagaimana peran *non-governmental organization* dalam lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif yang membantu mendeskripsikan, menggambarkan atau merangkum poin-poin data dari peran NGO dalam lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan melalui teori lokalisasi norma. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2018

hingga tahun 2023. Tahun 2018 menjadi awal tahun penelitian karena tahun ini merupakan tahun di mana Afrika Selatan menjadi negara dengan kasus tingkat kekerasan berbasis gender (GBV) tertinggi di dunia. Kemudian tahun 2023 dijadikan sebagai sebagai akhir tahun penelitian dikarenakan program-program mengenai penyebaran ide mengakhiri GBV serta alokasi dana untuk korban GBV masih dilaksanakan hingga tahun 2023.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara memanfaatkan literatur yang sudah ada atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan beberapa sumber literatur seperti artikel jurnal, portal berita, *website* resmi, serta dokumen laporan tahunan instansi terkait yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Sumber dari Undang-undang serta arahan kebijakan Afrika Selatan terhadap GBV penulis ambil dari *website* resmi negara, yaitu https://www.gov.za. Sedangkan artikel jurnal yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini yaitu *Gender-Based Violence (GBV) Localization: Humanitarian Transformation or Maintaining The Status Quo*, *South Africa's Sonke Gender Justice Network: Educating men for gender equality*, serta beberapa artikel jurnal pendukung lainnya.

Penulis memulai penelitian ini dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai program-program yang telah dilakukan dalam upayanya melokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan. Selanjutnya, data-data yang telah penulis kumpulkan tersebut kemudian akan penulis seleksi dan diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator proses lokalisasi dari Amitav Acharya. Selanjutnya penulis akan menganalisis masing-masing dari indikator tersebut untuk kemudian dapat menjelaskan proses lokalisasi secara runtut dan jelas. Data yang telah dianalisis tersebut akan memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian. Selain itu, analisis tersebut kemudian akan penulis sesuaikan dengan respon lokal dalam proses masuknya norma asing yang kemudian akan ditarik sebagai kesimpulan dari penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu tinjauan pustaka yang menjadi acuan bagi penulis yaitu sebuah artikel jurnal dengan judul Gender-Based Violence (GBV) Localization: Humanitarian Transformation or Maintaining The Status Quo oleh Karly Bennet pada tahun 2019. Artikel jurnal ini membahas mengenai agenda lokalisasi GBV di negara-negara Afrika seperti Iraq, Nigeria, Sudan Selatan serta Syria dengan pendanaan atau donor kepada aktor lokal (Bennett 2019). Hal ini bertujuan untuk melibatkan aktor lokal dalam mencegah dan menanggulangi korban-korban GBV. Tulisan ini bertujuan untuk membimbing the Gender-Based Violence Area of Responsibility (GBV AoR) dalam komintas GBV untuk meningkatkan keterlibatan aktor lokal dalam koordinasi, pencegahan, serta penanggulangan GBV.

Artikel jurnal ini juga menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan lokalisasi GBV di negara. Hambatan paling serius dalam lokalisasi GBV yaitu sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat setempat. Responden dari artikel ini juga memandang sistem patriarki sebagai pembatasan ruang bagi perempuan. Budaya patriarki ini dapat menghambat keterlibatan dan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat. Meskipun telah ada komitmen global dengan melakukan pendanaan untuk lokalisasi, nyatanya masih terdapat hambatan yang dihadapi dengan budaya setempat. Artikel jurnal ini mengatakan bahwa pendanaan saja tidak cukup untuk mewujudkan lokalisasi GBV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pra-Lokalisasi Norma

Proses pra-lokalisasi merupakan proses awal dari masuknya norma baru ke dalam suatu negara yang terlihat dari *transnational norms entrepreneur* yang mulai menyebarkan norma-norma internasional yang telah disepakati bersama oleh negara-negara di dunia (Acharya 2004). Di Afrika Selatan, terdapat beberapa *transnational norms entrepreneur* yang menyebarkan nilai-nilai mengakhiri

GBV, di antaranya seperti UN Women, UNICEF, dan UNFPA. Dalam menyebarkan nilai-nilai tersebut, UN Women telah melakukan berbagai upaya, di antaranya seperti Program Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls, Kampanye HeForShe, Spotlight Initiative, dan juga Kampanye 16 Days of Activism against Gender-Based Violence.

Program Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls diadakan di kota Cape Town pada tahun 2014 (Anggreini 2023). Program ini berfokus pada meningkatkan kesadaran dan kesetaraan gender di kota-kota dan ruang publik di Afrika Selatan. Dengan bekerja sama dengan ActionAid dan pemangku kepentingan utama lainnya di negara ini, UN Women berencana untuk mendorong lebih banyak investasi pada transportasi umum dan ruang publik yang aman bagi perempuan dalam proses perancangan dan pengambilan keputusan perencanaan kota. Pada program ini, kelompok perempuan seperti NGO lokal diminta untuk memberikan evaluasi terhadap ruang publik yang ada di negara tersebut ("Creating Safe Cities for Women and Girls Growing Gender Gap with Emerging Markets Must Be Addressed." 2020). Program HeForShe diadakan oleh UN Women yang bertujuan untuk menantang budaya kekerasan berbasis gender yang ada, mendorong dialog seputar HIV, serta meningkatkan rasa kebersamaan di kota Klerksdorp, Afrika Selatan (UN Women 2019). Program ini melibatkan beberapa inisiatif seperti pelatihan politik untuk perempuan, kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan kesadaran gender di masyarakat.

Selanjutnya yaitu program Spotlight Initiative yang merupakan program kolaborasi antara PBB dan Uni Eropa yang dimulai sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada tahun 2030 (UN Women 2020). Di Afrika Selatan, Spotlight Initiative mengerahkan investasi berskala besar untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan melalui Spotlight Initiative Africa Regional Program (SIARP) (UN Women 2017). Dalam

programnya, SIARP memberikan tanggapan regional untuk mengatasi kekerasan seksual dan reproduksi, praktik berbahaya, serta hak dan kesehatan seksual dan reproduksi.

Program UN Women berikutnya yaitu kampanye 16 Days of Activism against Gender-based Violence yang merupakan kampanye tahunan yang berskala internasional yang dirayakan setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember ("What Are the 16 Days of Activism, and Why You Should Care?" 2022). Kampanye ini menyoroti kebutuhan mendesak terhadap tindakan untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender di dunia. Selama 16 Days of Activism, kampanye ini mengajak masyarakat diseluruh dunia bersatu untuk meningkatkan kesadaran tentang pemberantasan GBV, menentang sikap diskriminatif, serta menyerukan perbaikan hukum dan layanan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Secara menyeluruh dalam menyebarkan nilai-nilai pemberantasan GBV, UN Women telah terlibat secara aktif dalam beberapa program, khususnya di beberapa negara dengan tingkat GBV tertinggi di dunia, termasuk Afrika Selatan.



Gambar 1. Kampanye 16 Days of Activism against Gender-Based Violence

Selain UN Women, UNICEF juga turut serta menjadi *transnational norms entrepreneur* dalam mencegah dan mengakhiri persinggungan antara kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan melalui program yang berupaya mengubah norma gender. Sejalan dengan Southern African

Development Community (SADC) Regional Strategy and Framework of Action for Addressing Gender-Based Violence (2018-2030), UNICEF telah bekerja sama dengan negara-negara SADC di tiga tingkat untuk mencapai target SDGs tentang mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki (United Nations Children's Fund 2023). UNICEF juga telah memainkan peran besar dalam berkembangnya norma *ending* GBV di Afrika Selatan. Hal ini dilihat dari UNICEF yang telah meluncurkan Influential Women's Circle (IWC) pada awal tahun 2018 dengan mandat untuk memobilisasi pemimpin perempuan dan filantropis di seluruh Afrika Selatan untuk membantu mengumpulkan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak-anak dari kekerasan dan pelecehan (UNICEF South Africa 2018).

Aktor lain yang berperan sebagai *norms entrepreneur* dalam mengakhiri GBV yaitu United Nations Population Fund (UNFPA). Dalam mengakhiri GBV, UNFPA telah melakukan serangkaian intervensi seperti program pencegahan, pemberian layanan, kebijakan dan undang-undang, serta data penelitian. Upaya tersebut juga terlihat dari adanya UNFPA Strategic Plan yang mencantumkan *ending gender-based violence* sebagai salah satu target capaiannya, khususnya pada outcome 3 yang berbunyi "Pada tahun 2025, pengurangan kekerasan berbasis gender dan praktik yang berbahaya telah meningkat pesat" (United Nations 2021). Dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender, UNFPA berupaya untuk merubah norma-norma sosial dan gender yang merugikan yang melanggengkan ketidaksetaraan gender. Hal ini dapat terlihat dari UNFPA yang bekerja dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk mempromosikan maskulinitas positif dengan tujuan menjamin kesetaraan gender dan mengakhiri kekerasan dan praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan, sekaligus tetap bertanggung jawab terhadap gerakan feminis.

Bersama UNICEF, UNFPA memimpin program bersama, yaitu the Global Programme to End Female Genital Mutilation untuk mengakhiri FGM dan

mempercepat aksi mengakhiri pernikahan anak sebagai salah satu faktor pendukung dari tingginya kasus GBV. Di Afrika Selatan, UNFPA telah berusaha mengajak *amakhosi* atau pemimpin adat untuk memerangi GBV di kota Kwa-Zulu Natal (Gaag, Heilman, and Gupta 2019). UNFPA bekerja sama dengan departemen-departemen pemerintah di Kwa-Zulu Natal untuk terlibat dalam diskusi aktif bersama *amakhosi* dalam mencari cara memerangi GBV di daerah pedesaan. Selain itu juga terdapat program "Safer South Africa for Women and Children" yang dilakukan oleh UNFPA. Program ini merupakan program kerja sama antara UNFPA dengan UNICEF dan pemerintah Afrika Selatan yang bertujuan untuk memperkuat pencegahan kekerasan di komunitas Afrika Selatan (Sonke Gender Justice 2014).

Hadirnya *norms entrepreneur* telah membuka mata aktor-aktor lokal di Afrika Selatan untuk kemudian mengadopsi norma tersebut. Pemerintah Afrika Selatan mulai melihat *ending gender-based violence* sebagai salah satu norma yang mempu menurunkan angka kekerasan serta pencapaian kesetaraan gender di Afrika Selatan. Hal ini terlihat dari Afrika Selatan yang mulai mendukung tiga resolusi penting dari Sidang ke-35 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada tahun 2017 tentang pentingnya mengatasi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta mengakhiri pernikahan anak usia dini (Sonke Gender Justice 2017).

Inisiatif Lokal

Tahapan selanjutnya dari proses lokalisasi norma yaitu adanya inisiatif lokal. Pada tahap ini, terdapat inisiatif dan kontribusi dari aktor lokal, baik dari organisasi lokal maupun individu. Tahap inisiatif lokal dari proses lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan dapat dilihat dari aktor lokal di Afrika Selatan seperti kelompok perempuan dan feminis untuk mendorong masyarakat setempat yang menyuarakan kegelisahan mereka dalam aksi protes pada tahun 2018.



Gambar 2 Aksi #TotalShutdownMovement Di Afrika Selatan

Aksi protes ini merupakan gerakan berskala nasional yang berlangsung di Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, North West, Free State, Eastern dan Western Cape. Aksi protes yang dilakukan oleh ribuan perempuan di Afrika Selatan ini bertujuan untuk menyampaikan kegelisahan mereka terhadap kekerasan berbasis gender atau GBV di Afrika Selatan (South African Government News Agency 2018). Kegiatan unjuk rasa ini diikuti oleh beberapa organisasi dan kelompok feminis di Afrika Selatan seperti Sonke Gender Justice, Foundation for Human Rights, Treatment Action Campaign, TEARS Foundation, Soul City Institute dan Tshwaranang Legal Advocacy Center. Bahkan Koordinator Residen PBB di Afrika Selatan, Nardos Bekele-Thomas turut hadir dan memimpin staf PBB di Tshwane untuk bergabung dalam pawai ini (UN Women 2018).

Kesadaran akan bahayanya GBV ini juga telah membuat para demonstran pergi ke kantor-kantor pemerintah untuk menyerahkan sebuah memorandum yang berisi 24 daftar tuntutan yang bertujuan untuk menjadikan Afrika Selatan menjadi negara yang lebih aman bagi perempuan serta agar pemerintah dapat mengambil tindakan lebih lanjut terhadap meningkatnya tingkat kekerasan terhadap gender. Gerakan #TotalShutdown ini akhirnya berhasil mendapat perhatian Presiden Cyril Ramaphosa, hal ini dibuktikan dengan adanya Konferensi Tingkat Tinggi Nasional mengenai GBV dan Femicide antara

pemerintah dan masyarakat sipil (Department of Justice and Constitutional Development 2018).

Adaptasi Norma

Tahapan ketiga dari proses lokalisasi norma yaitu tahap adaptasi. Pada tahap ini norma luar direkonstruksi atau disesuaikan agar dapat diterima oleh kepercayaan dan praktik lokal. Tahapan adaptasi norma *ending* GBV di Afrika Selatan dapat kita lihat dari beberapa aktor lokal seperti South African Youth Gender Action Plan, Foundation for Human Rights, dan Sonke Gender Justice yang berusaha menyesuaikan norma norma ending GBV seperti CEDAW, Konvensi Istanbul, Konferensi Beijing, serta SDGs yang dibawa oleh UN Women, UNFPA dan UNICEF sebagai *norms entrepreneur* dengan praktik lokal.

South African Youth Gender Action Plan (SA YGAP) merupakan sebuah inisiatif berbasis pemuda yang memberikan *roadmap* untuk mengatasi GBV dan menciptakan ruang inklusif gender. Dalam tahap adaptasi norma *ending gender-based violence*, SA YGAP memandu para pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga akademis dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif gender, sesuai dengan poin-poin SDGs (South African Institute of International Affairs 2024). Dalam mengatasi GBV, SA YGAP menyerukan pentingnya upaya yang lebih intensif dalam program pencegahan. Selain itu SA YGAP juga menekankan perlunya pembuatan kebijakan yang inklusif, memastikan keterwakilan suara-suara yang tidak didengar sebelumnya. SA YGAP ini juga didukung oleh Kantor Multi-Negara UN Women Afrika Selatan dalam menangani isu-isu gender yang berkaitan dengan SDGs pilar kelima melalui pendanaan dari Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) (UN Women 2024).

Selain SA YGAP, aktor lokal lain yang berperan dalam proses ini Foundation for Human Rights (FHR). FHR pada dasarnya merupakan sebuah aktor lokal di Afrika Selatan yang mendukung organisasi masyarakat sipil dan

gerakan sosial yang berupaya untuk mencegah dan menghilangkan GBV di Afrika Selatan. Dalam upaya mengadvokasi norma *ending gender-based violence*, FHR juga bekerja sama dengan Street Law unit of the University of Kwazulu-Natal untuk menyelenggarakan *workshop* tentang mengakhiri GBV kepada aparatur penegak hukum pada tahun 2018 (UN Women 2024). Dengan diadakannya *workshop* ini, FHR berharap dapat membangun kapasitas antarsektor, menjembatani forensik medis dan aspek hukum dari kekerasan berbasis gender. *Workshop* ini dilakukan dengan total 456 individu kurang lebih dari 90 organisasi dan institusi, termasuk perawat forensik, perwakilan National Prosecuting Authority, SAPS, dan berbagai organisasi masyarakat sipil.

Aktor lokal lainnya yang melakukan adaptasi norma *ending* GBV yaitu Sonke Gender Justice, yang merupakan organisasi yang berkomitmen pada prinsip-prinsip feminis dan menggunakan pendekatan berbasis hak transformatif gender untuk mencapai hak asasi manusia dan keadilan gender (Sonke Gender Justice 2024a). Sonke telah bekerja di Afrika Selatan dan di seluruh Afrika untuk memperkuat kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, serta warga negara untuk mendorong kesetaraan gender, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dan seksual, serta mengurangi penyebaran serta dampak dari HIV dan AIDS. Sonke juga pernah dipercaya oleh pemerintah Afrika Selatan untuk meninjau RUU Amandemen Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikarenakan Sonke juga telah berfokus dalam serangkaian program yang bertujuan untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Afrika Selatan (Peacock 2013).

Dalam melakukan advokasi terhadap norma ini, Sonke tidak hanya berfokus pada penanganan korban GBV seperti yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan. Sonke memiliki keyakinan bahwa untuk melawan patriarki dan mengakhiri kekerasan, diperlukan adanya kontribusi dari laki-laki dan anak laki-laki dalam mentransformasikan peran gender. Sonke percaya bahwa keterlibatan laki-laki dan anak laki-laki mampu menjadi salah satu solusi

untuk mencapai keadilan gender. Hal ini sangat sejalan dengan salah satu moto SDGs dari PBB, yaitu Leave No One Behind (Sonke Gender Justice 2024a).

Berangkat dari hal tersebut, Sonke Gender Justice bersama dengan Foundation for Human Rights telah melakukan advokasi yang aktif kepada pemerintah Afrika Selatan untuk menyegerakan pembuatan Rencana Strategis Nasional multi-sektoral yang didanai penuh untuk memerangi GBV. Menurut Sonke, NSP yang didanai penuh akan mencegah kekerasan secara efektif dengan adanya mobilisasi komunitas, intervensi dan respons dini, serta layanan dan dukungan psikososial yang berkualitas bagi para penyintas. Tidak hanya menuntut, SGJ dan FHR juga telah berpartisipasi dalam proses pembuatan Rencana Strategis Nasional untuk penghambatan GBV (Sonke Gender Justice 2024a). Kedua aktor lokal ini juga telah melakukan advokasi untuk memastikan bahwa Rencana Strategis Nasional yang akan dikeluarkan oleh Afrika Selatan nantinya harus mencakup semua kelompok masyarakat yang terkena dampak kekerasan berbasis gender dan pembunuhan *femicide*, termasuk perempuan, anak perempuan, laki-laki serta kaum LGBTQIA+.

Dalam melakukan advokasi, Sonke juga aktif mendukung *norms entrepreneur* untuk dapat menyebarkan norma *ending* GBV. Contohnya seperti kerja sama antara Sonke dan UNICEF Afrika Selatan dalam peluncuran State of the World's Fathers Report 2019 di Afrika Selatan dan peluncuran Engaging Fathers: The MenCare Child Care and Protection Program Brief di Pretoria pada tahun 2019 (Sonke Gender Justice 2019). Program ini dilakukan untuk mengikutsertakan laki-laki dalam berbagai perannya, baik sebagai orang tua kandung, kakek, paman, dan sebagainya dalam inisiatif-inisiatif yang akan meningkatkan keterlibatan aktif laki-laki dalam pengasuhan anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini dikarenakan berdasarkan laporan South African State of the Fathers tahun 2019, sekitar 71% anak-anak tinggal bersama pria dewasa dalam satu rumah tangga (Gaag, Heilman, and Gupta 2019). Dari jumlah tersebut 36% tinggal bersama ayah kandungnya, dan 35% lainnya tinggal

bersama pria dewasa yang bukan ayah kandungnya. Hal inilah yang kemudian mendorong UNICEF untuk memperkenalkan pola asuh yang baik kepada laki-laki dengan tidak melakukan kekerasan.

Selain itu, Sonke Gender Justice juga telah melaksanakan program "Safe at Home, Safe in Relationships-A Gender Transformative and Women's Rights Centered Approach to Addressing Intimate Partner Violence in South Africa" pada tahun 2020 yang didukung oleh UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund) di bawah naungan Spotlight Initiative yang secara khusus berfokus pada kekerasan yang telah dihadapi oleh perempuan oleh pasangan mereka (UN Trust Fund to End Violence against Women 2022). Program ini merupakan proyek multi-mitra yang telah dilaksanakan sejak Januari 2020 dan akan berakhir pada Mei 2023. Proyek Safe at Home, Safe in Relationships ini melibatkan semua anggota masyarakat dalam menentang gagasan-gagasan berbahaya mengenai patriarki, keyakinan tentang gender, serta seksualitas untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan lebih baik.

Sembari melakukan advokasi kepada pemerintah dan membantu *international norms entrepreneur*, Sonke Gender Justice telah melakukan beberapa program pencegahan GBV yang tidak hanya berfokus pada perempuan dan anak perempuan, tetapi juga merangkul laki-laki dan anak laki-laki melalui pendekatan transformatif gender (Sonke Gender Justice 2020). Salah satu program Sonke yang melibatkan laki-laki yaitu kampanye One Man Can (OMC). One Man Can merupakan sebuah kampanye yang mendorong laki-laki dan anak laki-laki untuk terlibat aktif dalam advokasi kesetaraan gender, mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga, serta menanggapi HIV dan AIDS.

Kampanye ini telah ditampilkan sebagai contoh praktik terbaik oleh beberapa organisasi di bawah naungan PBB seperti World Health Organization (WHO) dan United Nations Population Fund (UNFPA). Seiring masuknya pemahaman baru mengenai kekerasan berbasis gender (GBV), Sonke melihat bahwa kampanye One Man Can ini juga dapat membantu mengurangi angka GBV

di Afrika Selatan seperti keberhasilan Sonke dalam mencapai 25% dari 40.000 peserta lokakarya yang mengakses konseling serta tes sukarela (VCT) HIV pada tahun 2009 (Peacock 2013). Kegiatan OMC ini antara lain dapat berupa lokakarya (workshop) dan seminar mengenai GBV dan disabilitas, kampanye *door-to-door awareness*, melukis mural, pertunjukan teater mengenai GBV, turnamen sepakbola, serta menggalang acara publik massal pada tanggal-tanggal penting seperti Women's Month, Hari Pemuda, serta 16 Days of Activism on Gender-Based Violence (Sonke Gender Justice n.d.).

Amplivikasi dan Universalisasi

Amplifikasi dan universalisasi merupakan tahapan terakhir dari proses lokalisasi norma, di mana hasil dari rekonstruksi norma ini kemudian diaplikasikan secara keseluruhan. Berdasarkan artikel ilmiah yang ditulis oleh Amitav Acharya, tahapan amplifikasi dan universalisasi ini ditandai dengan adanya instrumen dan praktik baru yang dikeluarkan. Dalam proses lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan, tahap amplifikasi dan universalisasi ini ditandai dengan dikeluarkannya Rencana Strategis Nasional tentang GBV (NSP-GBVF) pada tahun 2020, Gender-Based Violence and Femicide Response Fund pada tahun 2021, serta RUU mengenai National Council on Gender-Based Violence and Femicide (NCGBVF) pada tahun 2022.

Rencana Strategis Nasional mengenai GBV dan Femicide merupakan sebuah kerangka kerja strategis yang bertujuan untuk memandu respon nasional terhadap krisis GBV yang sangat endemik di Afrika Selatan (Interim streering committe 2020). NSP-GBVF ini diluncurkan pada tanggal 30 April 2020 setelah melalui advokasi yang cukup lama dari Sonke Gender Justice, Foundation for Human Rights dan beberapa organisasi feminis lainnya, serta didorong oleh 24 tuntutan yang disampaikan pada gerakan #TotalShutdown pada tahun 2018. NSP ini melibatkan berbagai sektor seperti sektor keselamatan dan keamanan, sektor peradilan, sektor kesehatan, masyarakat sipil dan sektor swasta dalam upaya bersama untuk memahami akar penyebab atau pendorong GBVF di Afrika

Selatan dan cara mengatasinya, serta bagaimana memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban GBVF secara sistematis dan seragam di seluruh negeri (Sonke Gender Justice 2024b).

Selain NSP-GBVF, pemerintah Afrika Selatan juga telah meluncurkan Gender-Based Violence and Femicide Response Fund, yaitu sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden Cyril Ramaphosa pada bulan Februari 2021 yang bertujuan untuk memerangi GBVF di negara ini (GBVF Respons Fund 2021). Dana ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan berdasarkan penelitian, kesadaran, serta dukungan praktis kepada organisasi-organisasi yang secara aktif terlibat dalam perjuangan melawan GBV seperti Sonke Gender Justice, South African Youth Gender Action Plan dan Foundation for Human Rights. GBVF Response Fund ini bekerja dengan berpedoman pada NSP-GBVF dan dimaksudkan sebagai sarana sementara untuk mempercepat tindakan untuk mengatasi GBVF hingga dewan GBVF terbentuk (GBVF Respons Fund 2021).

Perubahan kelembagaan selanjutnya yaitu RUU mengenai National Council on Gender-Based Violence and Femicide (NCGBVF). RUU ini merupakan sebuah langkah maju untuk mendorong kebijakan strategis dan kerangka program multi-sektoral yang koheren untuk memastikan respon nasional terhadap krisis GBVF oleh pemerintah Afrika Selatan (South African Government News Agency 2022). RUU ini akan memfasilitasi implementasi yang efektif dari pengaturan kelembagaan untuk penerapan NSP sehubungan dengan pembentukan struktur independen yang dikenal sebagai Dewan Nasional Kekerasan Berbasis Gender dan Femicide.

KESIMPULAN

Hasil dari penellitian ini telah memperlihatkan bagaimana peran-peran dari IGO dan NGO lokal dalam proses lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan mulai dari pra-lokalisasi, inisiatif lokal, proses adaptasi, hingga tahap akhir yaitu amplifikasi dan universalisasi.

Tahapan pertama yaitu pra-lokalisasi, di mana UN Women sebagai *norms entrepreneur* mulai mengadakan kampanye HeForShe dan Spotlight Initiative di Afrika Selatan. Kampanye UN Women tersebut membuat pemerintah Afrika Selatan mulai melihat *ending gender-based violence* sebagai salah satu norma yang mampu mengatasi tingginya kekerasan di negara ini. Hal ini terlihat dari pemerintah Afrika Selatan mulai mendukung tiga resolusi penting dari Sidang ke-35 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada tahun 2017. Tahapan yang kedua yaitu inisiatif lokal, di mana ini terlihat dari kelompok perempuan dan feminis di Afrika Selatan melakukan aksi protes berskala nasional pada 1 Agustus 2018 di bawah tagar #TotalShutdown.

Tahapan ketiga yaitu adaptasi norma, di mana aktor yang memiliki peran penting di sini yaitu aktor lokal. Aktor lokal yang telah memainkan peran penting pada tahapan ini yaitu Sonke Gender Justice, South African Youth Gender Action Plan dan Foundation for Human Rights. Ketiga aktor lokal ini telah melakukan berbagai program dan advokasi kepada pemerintah untuk mendorong dan menyegerakan pembuatan Rencana Strategis Nasional untuk memerangi GBV secara inklusif dan mengikutsertakan perempuan, anak-anak, serta kaum LGBTQIA+. Selain itu Sonke juga menyerukan Departemen Pembangunan Sosial untuk segera memberikan kontribusi finansial terkait Thutuzela Care Centre sebagai tempat perawatan bagi korban GBV.

Tahap keempat yaitu amplifikasi dan universalisasi, yang ditandai dengan dikeluarkannya NSP-GBVF atau Rencana Strategis Nasional mengenai GBV, GBVF Response Fund, serta RUU tentang Dewan Nasional GBVF atau NCGBVF oleh pemerintah Afrika Selatan. Ketiga instrumen baru yang dikeluarkan ini menjadi titik akhir dari proses lokalisasi norma di Afrika Selatan. Instrumen yang dikeluarkan ini juga sekaligus menjadi penanda keberhasilan yang dicapai oleh aktor-aktor terkait dalam lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, Amitav. 2004. "How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism." *Global Governance*, 483–519. https://doi.org/10.4324/9781315254234-32.

Anggreini, Merry Silvia. 2023. "Peran Un Women Dalam Mengatasi Gender Based Violence Di Afrika Selatan Tahun 2014-2021." *Ejournal.Hi.Fisip-Unmul.Ac.Id* 11 (2): 247–61. https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/04/e-Journal Merry Silvia A (1802045026) (04-21-23-02-11-44).pdf.

Bennett, Karly. 2019. "Gender-Based Violence Localization: Humanitarian Transformation or Maintaining the Status Quo?" *Care USA, ActionAid International*, no. December.

Commision for Gender Equality The Republic of South Africa. 2020. *The Bare Minimum Commission for Gender Equality Report on South Africa Compiliance with CEDAW Commitee*.

"Creating Safe Cities for Women and Girls Growing Gender Gap with Emerging Markets Must Be Addressed." 2020. KPMG. 2020. https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2019/10/creating-safe-cities-for-women-and-girls.html#:~:text=The Safe Cities and Safe,in public spaces across different.

Department of Justice and Constitutional Development. 2018. "Declaration of the Presidential Summit Against Gender-Based Violence and Femicide."

Gaag, Nikki van der, Brian Heilman, and Taveeshi Gupta. 2019. "State of the World ' s Fathers." 2019. https://southafrica.unfpa.org/en/news/role-amakhosi-traditional-leaders-combating-gender-based-violence-and-femicide-gbvf-kwa-zulu.

GBVF Respons Fund. 2021. "Why We Started." 2021. https://gbvfresponsefund1.org/about-us/#:~:text=The Fund aims to play,LGBTQIA%2B persons in our lifetime.

Human Right Watch. 2021. "South Africa: Events of 2021."

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/south-africa.

Interim streering committe. 2020. "National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide FINAL-DOC-04-05." *National Strategic Plan on Gender Based Violence and Femicide*.

Peacock, Dean. 2013. "South Africa's Sonke Gender Justice Network: Educating Men for Gender Equality." *Agenda* 27 (1): 128–40. https://doi.org/10.1080/10130950.2013.808793.

Sonke Gender Justice. n.d. "About Sonke." https://genderjustice.org.za/about-us/about-sonke/.

———. n.d. "One Man Can." Sonke Community Education & Mobilisation. Accessed May 18, 2024. https://genderjustice.org.za/project/community-education-mobilisation/one-man-can/one-man-can-toolkit/.

———. 2014. "A Safer South Africa for Everyone." Sonke Video. 2014. https://genderjustice.org.za/video/a-safer-south-africa-for-everyone/.

———. 2017. "South Africa Called on to Vote in Favour of Three Important Human Rights Council Resolutions to Address Violence against Women." *Sonke News*, 2017. https://genderjustice.org.za/news-item/south-africa-called-vote-favour-three-important-human-rights-council-resolutions-address-violence-women/.

———. 2019. "Opening Remarks from UNICEF SA Child Protection Officer at State of the World's Fathers Report Launch." News. 2019. https://genderjustice.org.za/news-item/opening-remarks-from-unicef-sa-child-protection-officer-at-state-of-the-worlds-fathers-report-launch/.

———. 2020. "Sonke Gender Justice Strategic Plan : 2020 – 2024." Cape Town.

———. 2024a. "Sonke on Gender Based Violence Prevention." Sonke Work. 2024. https://genderjustice.org.za/video/sonke-on-gender-based-violence-prevention/.

———. 2024b. "The National Strategic Plan on Gender Based Violence and Femicide." Policy Development & Advocacy. 2024. https://genderjustice.org.za/publication/the-national-strategic-plan-on-

gender-based-violence-and-femicide/.

South African Government News Agency. 2018. "#TotalShutdown Calls for Action against Gender Based Violence." https://www.sanews.gov.za/south-africa/totalshutdown-calls-action-against-gender-based-violence.

———. 2022. "National Council on Gender-Based Violence and Femicide Bill Gazetted." 2022. https://www.sanews.gov.za/south-africa/national-council-gender-based-violence-and-femicide-bill-gazetted.

South African Institute of International Affairs. 2024. "Empowering Youth Voices: Addressing Gender-Based Violence in South Africa." Opinion & Analysis. 2024. https://saiia.org.za/research/empowering-youth-voices-addressing-gender-based-violence-in-south-africa/.

The Business Standart. 2020. "Countries with the Highest Rape Incidents," October 13, 2020. https://www.tbsnews.net/world/countries-highest-rape-incidents-144499.

UN Trust Fund to End Violence against Women. 2022. "#StoryOfResistance — Creating Safer Homes for Women and Girls in South Africa and Eswatini: Interview with Mpiwa Mangwiro-Tsanga at Sonke Gender Justice." Medium. 2022. https://untrustfundevaw.medium.com/storyofresistance-creating-safer-homes-for-women-and-girls-in-south-africa-and-eswatini-f666d377efb7.

UN Women. 2017. "Spotlight Initiative Africa Regional Programme (SIARP)." Spotlight Initiative. 2017. https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/eastern-and-southern-africa/liaison-office-to-au-and-uneca/spotlight-initiative.

———. 2018. "In South Africa, Women Call for #TotalShutdown of Gender-Based Violence." https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/news-in-south-africa-women-call-for-totalshutdown-of-gender-based-violence.

———. 2019. "HeForShe Taverns: A Transformative Initiative In South Africa Brings Men And Women Together To Combat Gender-Based Violence And HIV." 2019. https://www.heforshe.org/en/heforshe-taverns-

transformative-initiative-south-africa-brings-men-and-women-together-combat-gender.

———. 2020. "The Spotlight Initiative: Ending Violence against Women and Girls." https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/spotlight-initiative.

———. 2022. "16 Days of Activism against Gender-Based Violence." https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2023/11/press-release-un-women-calls-for-bold-investments-to-end-violence-against-women-in-light-of-new-report-showing-prevention-is-severely-underfunded#:~:text=UN Women's Gender Snapshot 2023,their i.

———. 2023. "Meta-Synthesis of UN Women Evaluations on Advocacy and Communications." Edited by Yamrote A. Haileselassie. New York. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-01/meta-synthesis_of_evaluations_on_advocacy_and_communications_2023_report.pdf.

———. 2024. "Generation Equality: A Vision to Transform South Africa through Youth-Led Policy Recommendations." 2024. https://africa.unwomen.org/en/stories/news/2024/06/generation-equality-a-vision-to-transform-south-africa-through-youth-led-policy-recommendations#:~:text=The SA YGAP consists of,Sector%3B Gender and Sustainable Transformation.

UNICEF South Africa. 2018. "Women and Philanthropy: UNICEF South Africa Influential Women's Circle." UNICEF Press Centre. New York. 2018. https://www.unicef.org/southafrica/stories/women-and-philanthropy.

United Nations. 2015. "Sustainable Development Goals." https://sdgs.un.org/goals.

———. 2021. "The UNFPA Strategic Plan, 2022-2025 Executive Board of the United Nations Development Programme, the United Nations Population Fund and the United Nations Office for Project Services."

United Nations Children's Fund. 2023. "Violence Against Girls, Boys and Women

in Southern Africa: A Statistical Profile." *Violence Against Girls, Boys and Women in Southern Africa: A Statistical Profile*. New York. https://doi.org/10.18356/9789213587065.

"What Are the 16 Days of Activism, and Why You Should Care?" 2022. International Women's Development Agency. 2022. https://iwda.org.au/what-are-the-16-days-of-activism-and-why-should-you-care/.